



Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

Andika S. Tabanal¹, Juriko Abdusammad², Fenti Prihatini Dance Tui³,

¹Administrasi Publik: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

²Administrasi Publik: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

³Administrasi Publik: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

e-mail: andiktabanal@gmail.com,

jurikoabdussamad@yahoo.co.id, fenti@ung.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) bagaimana Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Sumber data yang dilakukan menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan analisis model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian menunjukkan (1) Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang meliputi peran mengkoordinasikan, membina dan mengawasi sudah dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal pengawasan, namun belum optimal dalam koordinasi (Kurang SDM dan Respon OPD yang lambat), dan dalam proses pembinaan (Tingkat pemahaman aparatur desa rendah karena tingkat pendidikan rata-rata SLTA/SMA). (2) Faktor-faktor yang menentukan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari aspek (a) Kepemimpinan Camat yaitu Camat selalu memberikan bimbingan, motivasi serta arahan kepada bawahannya didalam melaksanakan pekerjaan. (b) Sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan aparatur kecamatan didominasi oleh tingkat pendidikan tinggi (S1) sedangkan di pemerintah desa masih banyak didominasi oleh tingkat pendidikan menengah atas (SLTA/SMA) sehingga perlu ditingkatkan, serta (c) Sarana dan Prasarana, hal ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan dalam menjalankan roda pemerintahan

Kata Kunci: Peran Camat, Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out (1) how the Camat's role in the administration of government in the Kabila sub-district, Bone Bolango district, (2) the factors that determine the success of the Camat's role in the administration of government in the Kabila sub-district, Bone Bolango district. The research method used is qualitative. Sources of data conducted using interviews. The data analysis technique used was interactive model analysis consisting of reduction, data presentation and conclusion drawing.

The research shows (1) the role of the sub-district head in the administration of government in the Kabila sub-district, Bone Bolango regency which includes the role of coordinating, fostering and supervising has been carried out well, especially in terms of supervision, but not optimal in coordination (lack of human resources and slow OPD response), and in the coaching process (the level of understanding of the village apparatus is low because the average education level is a high school/high school). (2) The factors that determine the role of the Camat in Government Administration in the Kabila Subdistrict, Bone Bolango Regency can be seen from the aspect of (a) the Camat's leadership, namely the Camat always provides guidance, motivation and direction to his subordinates in carrying out the work. (b) Human resources, this is indicated by the education level of the sub-district apparatus is dominated by the higher education level (SI) while in the village government it is still dominated by the upper secondary education level (SLTA/SMA) so that it needs to be improved, and (c) Facilities and Infrastructure, this is equipped with facilities and infrastructure to support the implementation of work in running the wheels of government

Keywords: *The Role of the Camat, Implementation, Local Government*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Tentunya sebagai negara berkembang pastinya masih memiliki berbagai macam kekurangan baik dalam hal tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat maupun dalam hal penyelenggaraan pemerintahannya, oleh karena hal tersebut menjadikan Indonesia terus – menerus melakukan berbagai macam perubahan – perubahan baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun dalam hal pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata khususnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Dalam hal ini hakekat pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan keseluruh pelosok tanah air yang mencakup kesemua aspek kehidupan manusia. Kemudian dalam hal tersebut dalam pelaksanaannya, tentunya memerlukan sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan pembangunan dan juga dapat melayani kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di ubah untuk ke dua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang tetap berlandaskan kepada Undang – Undang 1945 sebagai sumber hukum dan Undang – Undang Otonomi Daerah

sebelumnya. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur dari semua unsur- unsur diluar kewenangan pemerintah pusat. (Supriatna, 2020)

Kemudian pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu pemberian otonomi luas, suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, pemerataan, kekuasaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ubah menjadi Undang – Undang No 23 Tahun 2014 dan di ubah untuk ke dua kalinya menjadi Undang – Undang No 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya otonomi daerah yang sesuai dengan undang – undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat dalam hal ini daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat yang tujuannya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik didalam suatu daerah tersebut. (Azwan, 2014)

Selanjutnya dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan pemerintahan yang baik merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta prinsip – prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat sebagaimana di era pemerintahan sebelumnya. Kenyataan yang ada pada sekarang yang sering kita lihat bahwa sampai dengan saat ini pun pelaksanaan kehidupan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih mengalami berbagai macam masalah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan waktu untuk memikirkan bagaimana mencapai kesatuan kerjasama yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta kebebasan dalam mengambil keputusan, membuat pedoman pelayanan, mengalokasikan sumber daya anggaran, tujuan serta target kinerja yang jelas dan terukur. (Daniel Filterianto Robial, 2017)

Kecamatan Kabila merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bone Bolango, yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 7 Desa, yang dimana mempunyai jumlah penduduk 23.714 Jiwa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008, Pemerintah Kecamatan Kabila belum melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena dilihat dari peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal khususnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa atau kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa atau Lurah dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan sesuai dengan pengamatan yang dilakukan masih terdapat

kelemahan sehingga peranan Camat tersebut belum berjalan maksimal, efektif dan efisien. Permasalahan diatas dapat dilihat sesuai dengan data berikut:

Data Uraian Kegiatan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 1.1

No	Uraian Kegiatan	2018	2019	2020
1	Koordinasi	83 Kali	85 Kali	85 Kali
2	Pembinaan	57 Kali	60 Kali	60 Kali
3	Pengawasan	12 Kali	12 Kali	12 Kali
	Jumlah Hasil Kerja Per/Tahun	152 Kali	157 Kali	157 Kali

Sumber Data: Kantor Camat Kabila Kabupaten Bone Bolango 2020

Berdasarkan data uraian kegiatan pada tabel diatas tentang peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango tiga tahun terakhir yang dilihat dari proses koordinasi, pembinaan dan pengawasan dari tahun 2018 – 2020, terlihat bahwa peran camat mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2019 akan tetapi pada tahun 2019 – 2020 hasilnya tetap sama dari pengamatan kondisi tersebut nampaknya disebabkan antara lain masih kurangnya pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat itu sendiri khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

sehingga diperlukan peranan Camat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Dalam hal ini Camat selaku pemimpin pemerintahan di Kecamatan harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat UU RI No. 32 tahun 2004 dan PP RI No. 19 Tahun 2008, maka peranan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari tiga aspek yaitu:

Berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, melakukan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Dengan peranan yang efektif dari Camat, diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan bisa baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan dan melakukan penelitian menulis proposal skripsi dengan judul “Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam bahasan menurut Sugiyono (2009:29) Metode deskriptif dengan analisis kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta bagaimana memahami Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas. (Sugiyono, 2009).

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Seperti memperoleh informasi dari Camat Kabila dan Aparat yang berada di wilayah Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau instansi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive, yakni sampel yang diambil dengan berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi, Teknik observasi menurut Purhantara (2010) adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subyek), benda, atau kejadian (obyek). Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hidden observation yang mengamati kejadian atau perilaku yang terjadi di

lokasi penelitian tanpa sepengetahuan informan. Alat pengumpul datanya adalah panduan observasi. Melakukan pengamatan dan penelusuran di lapangan terhadap Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Wawancara (interview), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo 2012: 152). Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Camat Kabila, aparat kecamatan Kabila dan lain-lain. Pertanyaan diajukan pada proses wawancara berkembang untuk menggali lebih jauh jawaban partisipan. Alat pengumpulan datanya adalah pedoman wawancara. Melakukan wawancara dengan informan yang terkait. Pelaksanaan wawancara ini akan dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara tape-recorder guna menjamin perekaman semua informasi penting yang diungkapkan oleh informan penelitian.

3. Dokumentasi, Herdiansyah (2012:143) mendefinisikan dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Alat Pengumpulan datanya adalah form pencatatan dokumen. Metode ini digunakan untuk menjangkau informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis, mekanisme dan prosedur atau informasi lainnya

yang terkait dengan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.

Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2007) aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Dimana proses pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi/kesimpulan merupakan proses siklus yang berlangsung secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain. Secara runtut, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan seperti di bawah ini:

1. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

Membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data. Dalam kegiatan ini dilakukan penyajian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian tersebut dilakukan dalam bentuk table dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah upaya mencari arti data yang tercatat mengenai pola-pola penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan preposisi. Kegiatan reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan yang jalin menjalin antara sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian tentang Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dapat ditinjau melalui Peran Camat dalam

1. Peranan Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Peranan membina Penyelenggaraan Pemerintahan

3. Peranan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan (Nicky Tulandi, Sonny Rompas, Jericho pombengi 2015)

Faktor – faktor yang menentukan keberhasilan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Andi Muhammad Ade F 2016)

1. Kepemimpinan Camat

2. Sumber Daya Manusia

3. Sarana dan Prasarana

Proses koordinasi di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Pihak kecamatan dalam hal ini Camat, Pemerintah Desa dan Kelurahan telah berusaha untuk melakukan kegiatan koordinasi ini agar nantinya proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di kecamatan kabila dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun didalam proses pengkoordinasian masih memiliki kendala yaitu

proses penindaklanjutan terkait dengan koordinasi yang diusulkan lambat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang disebabkan oleh sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja yang kurang dan juga ada faktor ego sektoral yang berada didalam organisasi perangkat daerah (OPD). Faktor ego sektoral yang berada didalam OPD terkait, yaitu faktor yang hanya menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompoknya (Memilih – milih pekerjaan yang dilakukan) yang mengakibatkan proses pelaksanaan/ pengeksekusian proses koordinasi yang diusulkan sering kali terlambat dilaksanakan sehingga aparat pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat harus melakukan koordinasi secara terus – menerus agar proses penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini tentang koordinasi bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah yang berada di wilayah kecamatan.

Proses pembinaan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan dengan baik. Pihak kecamatan dalam hal ini Camat telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan melakukan berbagai macam pembinaan baik kepada aparat pemerintahan yang ada di kecamatan maupun di desa dan kelurahan. Pembinaan yang dilakukan baik secara langsung maupun pembinaan yang dilakukan tidak secara langsung sehingga aparat yang berada di pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan bisa menjalankan tugas atau pekerjaannya dengan baik karena pemerintahan kecamatan dalam hal

ini Camat sering melakukan pembinaan secara rutin. Pembinaan yang dilakukan secara rutin ini dapat memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango ini sehingga bisa menjadi lebih baik, namun juga didalam proses pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan sering kali mengalami kendala yaitu salah satu nya pembinaan yang dilakukan kepada aparat desa yang sulit memahami terkait dengan pembinaan yang diberikan yang diakibatkan kurangnya sumber daya manusia yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat desa rata – rata masih SLTA/SMA sehingga pemerintah kecamatan selalu melakukan pembinaan secara berulang – ulang kepada aparat desa agar aparat desa mampu memahami dari pembinaan yang diberikan sehingga proses penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik dan efektif khususnya didalam pemerintahan desa.

Proses pengawasan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan dengan baik. Pihak kecamatan dalam hal ini Camat telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu dengan melakukan pengawasan kepada aparat pemerintahan kecamatan itu sendiri maupun kepada pemerintahan desa dan kelurahan. Pengawasan yang dilakukan itu baik secara langsung dengan melihat langsung proses penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan maupun proses pengawasan secara turun langsung kepada pemerintahan desa, kelurahan dan juga pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung

yaitu melalui laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan kepada pemerintahan kecamatan yang semua hal tersebut dapat memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan karena sering dilakukan pengawasan oleh pemerintahan kecamatan tersebut dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh Camat kabila Kabila Kabupaten Bone Bolango terhadap jajaran pemerintahan dibawahnya sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan khususnya di kecamatan kabila ini bisa berjalan dengan baik.

Kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Kabila untuk menjalankan roda pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dimana Camat Kabila sendiri selalu melakukan bimbingan, motivasi serta arahan kepada bawahannya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan kemudian juga Camat Kabila didalam menjalankan roda pemerintahan kecamatan sering melakukan rapat/apel kerja dengan pemerintahan desa dan kelurahan yang membahas tentang laporan hasil capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan selama seminggu sekali. Laporan hasil capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan selama seminggu sekali yaitu baik proses pembangunan, kedisiplinan pegawai, pemberdayaan masyarakat dan pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat dan juga Camat kabila sering turun langsung ke setiap desa dan kelurahan untuk mengawasi dan melihat langsung proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa dan kelurahan

sehingga sikap kepemimpinan yang diimplementasikan oleh Camat Kabila sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan melakukan kerja sama antara pimpinan dan bawahan didalam mencapai tujuan dari organisasi yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

Sumber daya manusia memang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi karena ketika aparat pemerintah maupun pemimpin didalam pemerintahan tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka pastinya proses penyelenggaraan pemerintahan didalam suatu pemerintahan tersebut akan berjalan maksimal seperti pada Pemerintahan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dimana kualitas sumber daya manusia yang berada di kecamatan tersebut bisa dikatakan sudah memumpuni karena sebagian besar aparat pemerintahan yang berada di kecamatan tersebut sudah memiliki tingkat pendidikan strata 1 sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prosedur, begitu juga pemimpin dalam pemerintahan kecamatan tersebut dalam hal ini Camat sudah berkualitas dalam menjalankan roda pemerintahan karena memiliki tingkat pendidikan strata 2 sehingga untuk mencapai tujuan didalam proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tersebut berjalan dengan baik karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

Sarana dan prasarana yang berada didalam pemerintahan kecamatan Kabila Kabupaten, Bone Bolango sudah dapat menunjang proses jalannya pemerintahan sehingga hal ini dapat mendukung didalam proses pencapaian keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango diantaranya yaitu gedung kantor, gedung pertemuan/rapat, ruangan pelayanan, ruangan aparat pemerintah kecamatan maupun ruangan Camat, Sekretaris Camat dan didukung oleh sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti kendaraan dinas, laptop, computer, print dan lain – lain yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Maka dalam penelitian ini Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dilihat/dibatasi pada tiga hal yaitu (1) Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, (2) Peranan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan (3) Peranan Camat dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Camat dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan baik dan efektif.

2. Peranan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan baik dan efektif.

3. Peranan Camat dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dilakukan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapatlah dinyatakan bahwa Camat sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam melakukan kewenangannya dalam mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan sehingga dapat mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik.

Faktor – faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango yaitu:

a. Kepemimpinan Camat merupakan faktor pendukung didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan karena Camat sering memberikan bimbingan, motivasi serta arahan kepada aparat pemerintahannya baik didalam pemerintahan kecamatan maupun di pemerintahan desa dan kelurahan dalam upaya pencapaian hasil

program kecamatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

b. Sumber daya manusia merupakan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, karena Camat Kabila mempunyai tingkat pendidikan strata 1 yaitu sarjana social dan starta 2 yaitu magister manajemen sehingga hal ini dapat mendukung kegiatan proses penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan menggunakan disiplin ilmunya. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya jumlah sumber daya manusia/tenaga kerja organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga dapat memperlambat proses pelaksanaan/pengeksekusian usulan data yang disampaikan dan juga tingkat pendidikan dari aparat pemerintahan desa yang masih kurang yaitu rata – rata tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat desa masih SLTA/SMA sehingga hal ini dapat mempengaruhi terhadap pekerjaan yang dilakukan yang disebabkan oleh ketidakmampuan aparatur desa didalam memahami proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.

c. Sarana dan Prasarana merupakan faktor pendukung didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan karena sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kabila sudah lengkap dan memadai sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang ada didalamnya.

SARAN

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terdapat 3 tugas pokok dan fungsi camat yakni Peran Camat dalam Mengkoordinasikan, Peran Camat dalam Membina dan Peran Camat dalam Mengawasi. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan : Peranan Camat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal yakni Kualitas SDM yang masih kurang, juga respon dari OPD yang lambat untuk itu sebaiknya perlu adanya peningkatan SDM di tingkatan instansi OPD terkait, dan juga Camat harus mengoptimalkan penggunaan sarana koordinasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintahan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

2. Membina: Peranan Camat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal yakni tingkat pemahaman aparatur Desa yang masih kurang karena kualitas SDM yang masih rendah yaitu rata-rata pendidikan terakhir aparatur desa masih SLTA/SMA. Untuk itu sebaiknya di tingkatan pemerintahan Desa pengrekrutan aparatur desa minimal harus pendidikan terakhirnya adalah Sarjana dan juga

Camat harus dapat mengoptimalkan potensi dan kemampuan dalam melakukan pembinaan terhadap unit – unit kerja pemerintah di wilayah kerja kecamatan khususnya pada aparat desa yang berada di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

3. Mengawasi : Peranan Camat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan efektif sesuai peraturan perundang undangan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Dengan demikian yang diharapkan adalah mempertahankan tugas pokok dan fungsi Camat khususnya pada Peran Camat dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Muhammad Ade F (2016) ‘Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa’, 6, pp. 89–100.

Azwan, K. (2014) ‘Pemerintahan Daerah Menurut Undang - Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah’, 2(23), pp. 201–210.

Daniel Filterianto Robial (2017) ‘Peran Pemerintah Kelurahan dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2008.

Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Supriatna, D. (2020) ‘Pembinaan Dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang’, 6, pp. 310–330.

Tiara Aprilia Anggraini (2018) ‘Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang - Undang No 23 tahun 2014 Pasal 225 Ayat 1 di Kecamatan Kalasan’, 151(2), pp. 10–17.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Yayat Rukayat (2016) ‘Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat’, 2017, pp. 35–40.

Yosua Kogoya. Ventje Kasenda. Neni Kumayas. (2019) ‘Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire’, *Jurnal Eksekutif*, 3(3), pp. 1–9.